

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Akuntansi
(S1)**

Pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun oleh :

Veronica Geta Tis Prakasita

NPM : 16 04 22462

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

MARET 2021

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Akuntansi
(S1)**

Pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun oleh :

Veronica Geta Tis Prakasita

NPM : 16 04 22462

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

MARET 2021

Skripsi

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018**



Disusun Oleh :
Veronica Geta Tis Prakasita
NPM : 16 04 22462
Telah dibaca dan disetujui oleh :

Pembimbing



H. Andre Purwanugraha, SE., MBA.

15 Maret 2021



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

SURAT KETERANGAN

No. 375/J/I

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Senin, 12 April 2021 dengan susunan penguji sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si. | (Ketua Penguji) |
| 2. H. Andre Purwanugraha, SE., MBA. | (Anggota) |
| 3. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. | (Anggota) |

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Veronica Geta Tis Prakasita

NPM : 160422462

Dinyatakan

Lulus Dengan Revisi

Pada saat ini skripsi Veronica Geta Tis Prakasita telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,



Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.
FASBIS DAN EKONOMIKA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018**

benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain, dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yogyakarta, 15 Maret 2021



Veronica Geta Tis Prakasita

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan karya tulis yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018” dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mendapatkan hambatan dan kesulitan dimana tanpa bantuan dari orang-orang sekitar peneliti tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah mendampingi, menyertai, dan memberikan kekuatan kepada peneliti.
2. Keluarga peneliti Vincentia Enni Judradjati (Ibu), Supardjiah Yuremi (Eyang Putri). Terima kasih atas semangat, bantuan, kasih sayang, dan doa yang selalu diberikan kepada peneliti.
3. Bapak H. Andre Purwanugraha, SE., MBA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing peneliti dan meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. Dosen-dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Neni, Ibu Yanti, Ibu Fitria, Pak Novi, Pak Iwan, dan Bapak Ibu yang lain. Romo Tri Wahyu, dan Romo Gendhon (Alm) yang telah memberikan motivasi dan semangat selama perkuliahan selama wawancara untuk selalu mengandalkan Tuhan.
5. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur yang telah bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

6. Para responden penelitian dan segenap keluarga besar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang telah bersedia untuk menjadi responden dan memberikan informasi yang peneliti butuhkan.
7. Teman-teman peneliti Liana, Astrid, Mayor, Lisa, Angel, Agnes, Vera, Dinda, Romy, Farrel, Via, Iqbal, Reza, Bang Kun, Sevin, Veda, Christy, Echa, Sanja, Amora, Jannes. Terima kasih telah mendengarkan keluhan, memberikan semangat, dan motivasi kepada peneliti.
8. Teman-teman KKN 76 UAJY Padukuhan Jobolawang, Itha, Yoga, Satrio, Dinda, Lala dan Jeffri. Terima kasih atas dinamika, semangat, pengalaman, dukungan dan doa selama menjalani KKN hingga akhir perkuliahan peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun untuk penelitian yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Yogyakarta, 15 Maret 2021



Veronica Geta Tis Prakasit

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHAN KEPADA :

TUHAN YANG MAHA ESA

(ALM) BAPAK F.X AGUNG BUDIYANTO

IBU VINCENTIA ENNI JUDRADJATI

EYANG YUREMI

TEMAN DAN SAHABATKU

DAN ORANG-ORANG DISEKITAR

“Berjuanglah Sampai Titik Darah Penghabisan”

“Berdoa Dapat Mengubah Segalanya”

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia	9
2.1.2 Sistem Pengendalian Internal.....	11
2.1.3 Pengawasan Keuangan Daerah.....	16
2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17
2.2. Kerangka Pemikiran.....	21
2.3. Pengembangan Hipotesis.....	21
2.3.1 Kualitas SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .	21
2.3.2 Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	22

2.3.3 Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1. Jenis Penelitian	24
3.2. Sampel	24
3.3. Obyek Penelitian	24
3.3.1 Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	24
3.3.2 Lokasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember	26
3.3.3 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	26
3.4. Metode Penelitian.....	27
3.5. Teknik Pengumpulan Data	28
3.6. Operasionalisasi Variabel.....	29
3.7. Tingkat Keyakinan dan Kesalahan.....	32
3.8. Statistik Deskriptif	33
3.9. Uji Pendahuluan	33
3.9.1 Uji Validitas.....	33
3.9.2 Uji Reliabilitas	34
3.10. Uji Asumsi Klasik	34
3.10.1 Uji Normalitas Data.....	34
3.10.2 Uji Multikolinearitas.....	34
3.10.3 Uji Heterokedastisitas	35
3.11. Pengujian Statistik dan Hipotesis	35
3.11.1 Analisis Regresi Linear Berganda	35
3.11.2 Koefisien Determinasi	36
3.11.3 Uji Simultan (Uji F)	37
3.11.4 Uji T.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Hasil Penelitian.....	39
4.1.1 Deskripsi Data.....	39

4.1.2 Deskripsi Responden	40
4.2. Analisa Data	43
4.2.1 Statistik Deskriptif	43
4.2.2 Uji Validitas.....	45
4.2.3 Uji Reliabilitas	48
4.2.4 Uji Normalitas.....	48
4.2.5 Uji Multikolinearitas.....	49
4.2.6 Uji Heterokedastisitas	50
4.2.7 Analisis Regresi Linear Berganda	50
4.2.8 Koefisien Determinasi (R^2).....	52
4.2.9 Uji F.....	53
4.2.10 Uji t.....	54
4.3. Pembahasan	55
4.3.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	55
4.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pmerintah Daerah	57
4.3.3 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	58
BAB V PENUTUP.....	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Keterbatasan Penelitian	59
5.3. Saran.....	59
Daftar Pustaka.....	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skor Jawaban Likert.....	29
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel.....	30
Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner.....	40
Tabel 4.2 Pengujian Karakteristik Jenis Kelamin.....	41
Tabel 4.3 Pengujian Karakteristik Umur.....	41
Tabel 4.4 Pengujian Karakteristik Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 4.5 Pengujian Karakteristik Latar Belakang Pendidikan.....	43
Tabel 4.6 Karakteristik Lama Kerja.....	43
Tabel 4.7 Descriptive Statistics.....	44
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas X1.....	46
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas X2.....	47
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas X3.....	48
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Y.....	48
Tabel 4.12 Uji Reliabilitas.....	49
Tabel 4.13 Uji Normalitas	50
Tabel 4.14 Uji Multikolinearitas.....	51
Tabel 4.15 Uji Heterokedastisitas.....	51
Tabel 4.16 Regresi Linear Berganda.....	52
Tabel 4.17 Koefisien Determinasi.....	54
Tabel 4.18 Uji F.....	55
Tabel 4.19 Uji t.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2018...4
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....21



**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018**

Disusun Oleh :

Veronica Geta Tis Prakasita

16 04 224262

Pembimbing :

Heribertus Andre Purwanugraha, SE., MBA

Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yogyakarta

Jalan Babarsari 43-44 Yogyakarta.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian terdahulu antar variabel independen yaitu variabel kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Obyek penelitian adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember.

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu kuesioner yang dibagikan kepada karyawan BPKAD. Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan BPKAD Kab Jember yang bekerja di bidang akuntansi, anggaran, perbendaharaan, dan aset dengan jumlah 47 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi yang didirikan seiring dengan diberlakukannya UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah terus dilakukan evaluasi dan evolusi yang dilanjutkan dengan reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah yang salah satunya ditetapkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No 17 tahun 2003 pasal 31 disebutkan bahwa “Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.”

Laporan keuangan adalah media bagi sebuah entitas. Entitas yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berisi informasi keuangan yang berkualitas. Menurut PP No 71 thn 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah yang memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi. Dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Untuk entitas pemerintahan, dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah maupun organisasional tentang pemerintahan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, dengan didukung latar belakang pendidikan akuntansi,

mengikuti berbagai macam pelatihan dan pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, maka akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Menurut Warisno (2008), ketika sumber daya manusia yang ada dalam pemerintah daerah tidak memahami dan menerapkan logika akuntansi, maka akan berdampak pada laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat akan memuat kekeliruan dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan derajat pengetahuan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan intelektualitas seseorang. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka OPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

Pengalaman kerja dalam suatu organisasi menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama pegawai berkerja dalam suatu bidang organisasi, maka semakin berpengalaman dan memahami tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam penyusunan laporan keuangan daerah, OPD diharapkan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengalaman kerja yang lebih lama di bidang akuntansi atau keuangan, karena dalam penyusunan laporan keuangan daerah dibutuhkan pegawai yang benar-benar paham akuntansi atau keuangan dan aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Hal yang paling penting dan mendasar dalam bidang akuntansi adalah sistem akuntansi. Penyusunan laporan keuangan melalui sistem akuntansi. Sistem akuntansi terdiri dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan daerah merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi

komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Ketika data yang telah dikumpulkan kurang/valid/salah maka akan mempengaruhi hasil akhir dari laporan keuangan daerah tersebut.

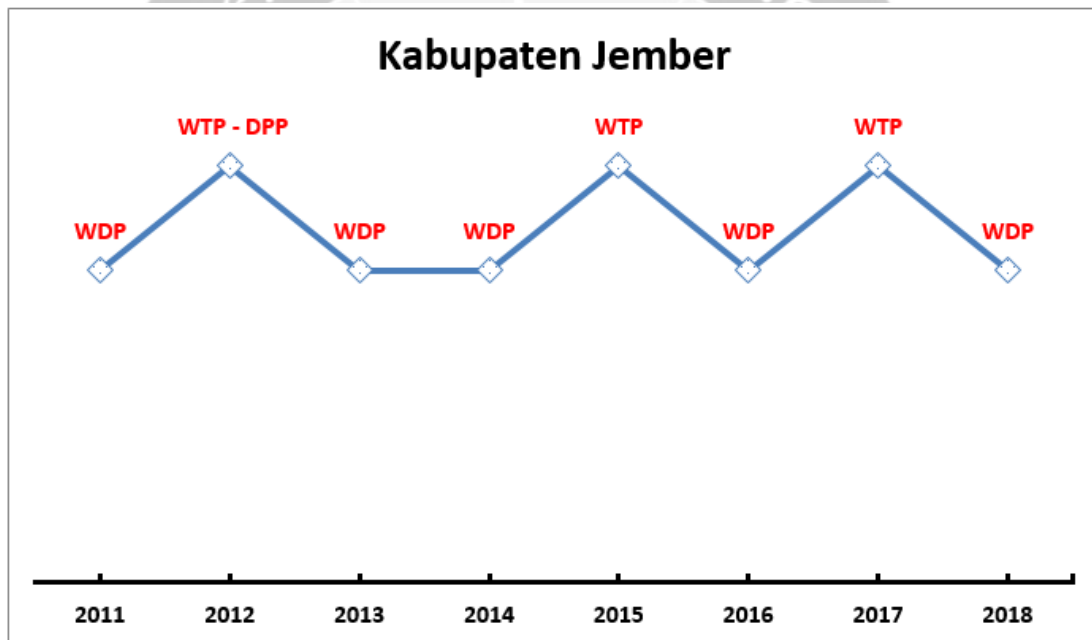
Dalam setiap tahun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada 4 opini yang diberikan saat pemeriksaan yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintahan daerah merupakan salah satu hal yang menarik. Dengan adanya pelaporan keuangan pemerintahan daerah masyarakat dapat menilai cara kerja pemerintah daerah melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun, masih ditemukan data yang disajikan salah karena tidak sesuai dengan faktanya. Banyak nya penyimpangan dalam LKPD ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) saat melakukan pemeriksaan audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan dalam sebuah entitas dan mempunyai pengaruh saat pembuatan laporan keuangan. Agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan mendapatkan opini yang baik, maka sangat dibutuhkan sistem pengendalian internal. Ketika sistem pengendalian internal tidak menunjukkan efektivitas atau belum optimal, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah kurang efisien dalam melaksanakan sistem pengendalian internal. Dengan adanya sistem pengendalian internal, dapat digunakan untuk menjaga informasi dari kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Ketika pengendalian tersebut dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan informasi yang andal dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Ketika sistem pengendalian dibentuk, maka perlu adanya pengawasan. Yang dimaksud pengawasan disini adalah pengawasan keuangan daerah. Pengawasan

keuangan daerah adalah salah satu komponen dari pengendalian internal pemerintah. Pengawasan keuangan daerah perlu dilakukan untuk menghindari penyelewengan dana. Dengan adanya pengawasan keuangan daerah, maka dapat ditetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan, serta sebagai langkah untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan (Kadarman, 2001) Diharapkan dengan adanya pengawasan keuangan daerah, dana yang didapatkan dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1.1

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2018
 Sumber : surabaya.bpk.go.id

Pada gambar 1.1 terdapat grafik laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten jember tahun 2011-2018. Pada tahun 2016, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Kabupaten Jember. Tahun 2017, LKPD Kabupaten Jember mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini

tersebut meningkat daripada opini tahun 2016. Namun, pada tahun 2018 BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk LKPD tahun 2018 kepada Kabupaten Jember. Opini ini menurun jika dibandingkan opini LKPD tahun 2017.

Adanya kenaikan opini di tahun 2017 menggambarkan bahwa ada perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya kenaikan opini, secara tidak langsung menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun pada tahun 2018, opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menurun. Penurunan opini disebabkan karena adanya penurunan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Dasar opini wajar dengan pengecualian yang diberikan BPK terhadap Kabupaten Jember menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan :

1. Pemerintah Kabupaten Jember menyajikan akun Kas Lainnya sebesar Rp 27,40 miliar dan akun Utang Beban sebesar Rp 20,74 miliar. Nilai akun Kas Lainnya belum termasuk uang yang digunakan untuk pembayaran belanja kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) Tahun 2018 yang masih berada di rekening 1.019 sekolah per 31 Desember 2018 sebesar Rp 32,88 miliar. Satuan kerja terkait tidak melakukan verifikasi pertanggungjawaban kegiatan PPG secara memadai dan tidak menyelenggarakan pembukuan Hutang Beban terkait kegiatan PPG tahun 2018. Dalam hal ini, BPK tidak mendapatkan bukti yang cukup dan tepat tentang nilai Hutang Beban kegiatan PPG Tahun 2018
2. Pemerintah Jember menyajikan akun Persediaan sebesar Rp 90,12 miliar dan Beban Persediaan sebesar Rp 244,56 miliar. Dalam penatausahaan persediaan, terdapat OPD yang tidak melakukan inventaris fisik atas persediaan yang dimilikinya per 31 Desember 2018 dan tidak menyelenggarakan Kartu Persediaan untuk mencatat mutasi Persediaan secara memadai. Saldo Persediaan sebesar Rp 90,12 miliar tidak seluruhnya dapat ditelusuri terhadap

fisik Persediaan sehingga terdapat selisih pencatatan saldo Persediaan dengan fisik Persediaan yang tidak dapat dijelaskan sebesar Rp 17,54 miliar. Selain itu, terdapat nilai Beban Persediaan berbeda dengan pencatatan mutasi keluar Persediaan yang tidak dapat dijelaskan sebesar Rp 67,43 miliar. BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas posisi per 31 Desember 2018. Akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

3. Pemerintah Kabupaten Jember menyajikan akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.352,25 miliar dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 340,04 miliar. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dihasilkan oleh aplikasi perhitungan penyusutan yang diantaranya menghasilkan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 789,88 miliar dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 1.838,13 miliar. Aplikasi perhitungan penyusutan tersebut dimutakhirkan pada tahun 2018, namun rumusan perhitungan penyusutan tersebut atas atribusi aset rehab / renovasi ke aset induk tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember 2018 yang telah disusun tidak berkualitas, karena mengandung informasi yang tidak relevan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang, mempertahankan opini yang baik tidaklah mudah. Maka peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- 2) Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- 3) Apakah Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh positif Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh positif Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh positif Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memiliki manfaat antara lain :

- 1) Bagi Penulis
Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam bidang sektor publik sesuai dengan teori yang diperoleh dalam perkuliahan.
- 2) Bagi Pemerintah
Diharapkan dapat memberikan saran bagi pemerintah agar lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini terdiri dari tiga bab yang diuraikan secara garis besar sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, sampel penelitian, metode pengumpulan data, analisis data dan teknik analisis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan analisis dan hasil pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada bab IV, telah dijelaskan mengenai hasil pembahasan atas pengujian untuk melihat pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualitas sumber daya berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu :

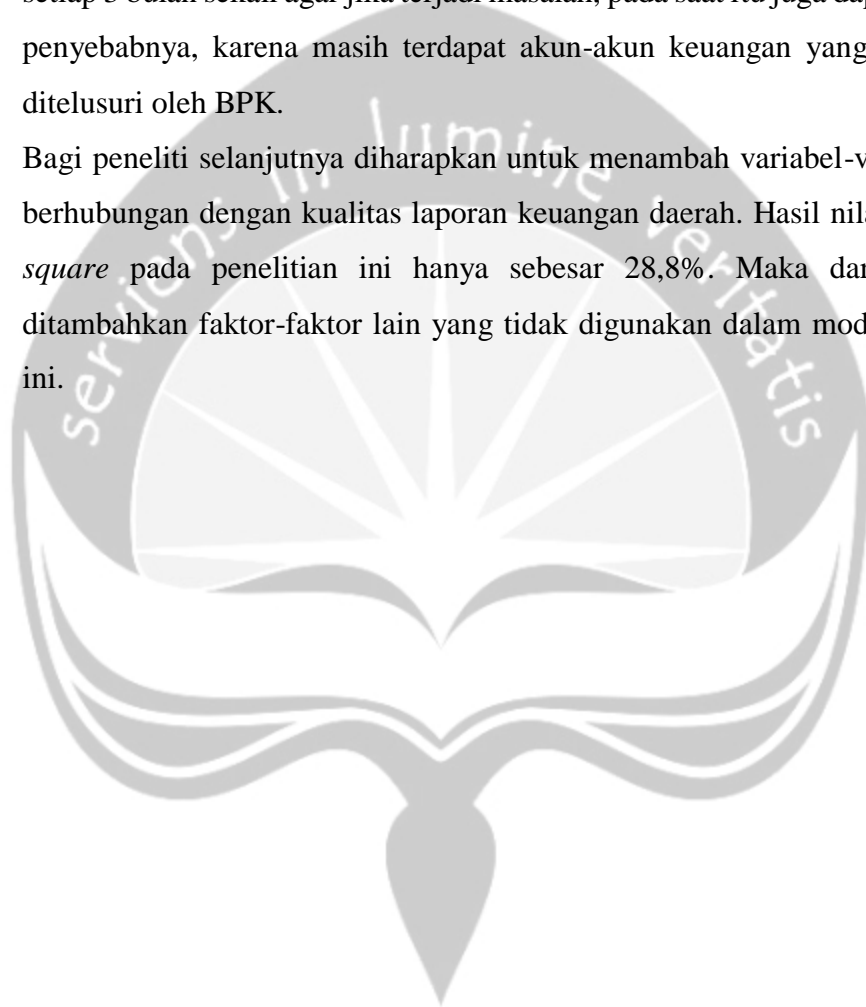
1. Kuesioner yang diisi oleh responden terkadang tidak menunjukkan pendapat yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena adanya faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.
2. Sedikitnya jumlah sampel yang diambil karena keterbatasan biaya dan tenaga peneliti. Sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada kelompok subyek dengan jumlah besar.

5.3. Saran

1. Bagi BPKAD Kabupaten Jember diharapkan mampu meningkatkan kualitas di bidang keuangan dengan menyelenggarakan pelatihan keuangan, selain itu

sistem pengendalian internal lebih baik ditingkatkan atau *diupgrade* agar organisasi dapat terintegrasi dengan baik supaya Pemerintah Kabupaten Jember tidak mendapatkan opini WDP kembali. Untuk pengawasan keuangan daerah perlu ditingkatkan kembali dengan cara melakukan evaluasi keuangan setiap 3 bulan sekali agar jika terjadi masalah, pada saat itu juga dapat ditelusuri penyebabnya, karena masih terdapat akun-akun keuangan yang tidak dapat ditelusuri oleh BPK.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan daerah. Hasil nilai *adjusted r square* pada penelitian ini hanya sebesar 28,8%. Maka dari itu, perlu ditambahkan faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.



Daftar Pustaka

- Abdul, H. (2010). *Statistika Deskriptif*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Arens, A. (2005). *Auditing dan Jasa Assurance*. (d. S. Wibi Hardani, Ed., & H. Wibowo, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Arfianti, D. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- B, M. (2009). *Accounting Information Systems*. USA: Cengage Learning.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halimah, N. (2016). *Manajemen Penatausahaan Aset Tetap (Tanah) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember*. Jember.
- Harahap, S. (2008). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, A. D. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *JOM FEKON*.
- Johnson, E. (2007). *Contextual Teaching and Learning*. Bandung: Mizan Learning Center (MLC).
- Kadarman. (2001). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenhallindo.
- Martindas, R. (2002). *Managemen SDM Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan dan Usaha* (II ed.). Jakarta: Grafiti.
- Mulyadi. (2013). *System Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munteh, R. R. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Labuhan Batu.
- Nurillah, D. A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok).
- Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 56 Tahun 2012*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (n.d.).

- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.* (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.* (n.d.).
- Priyatno, D. (2013). *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Riduwan. (2002). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rini, N. W. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan, SDM, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
- Simamora, H. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (III ed.). Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukmaningrum, T. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Studi Empris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang).
- Tantriana. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM dan Manajerial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada DPPKAD Kabupaten Buol).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.* (n.d.).
- UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.* (n.d.).
- UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.* (n.d.).
- Warisno. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pranara Luar :

<https://surabaya.bpk.go.id/bpk-beri-opini-wdp-kepada-kota-pasuruan-dan-kabupaten-jember/>

https://surabaya.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/10-07-2019-BPK-Kab-Jember-Harian-Pagi-Surya-Hal-18_001.jpg

<https://surabaya.bpk.go.id/dprd-kabupaten-jember-soroti-predikat-wdp/>





A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr mengisi daftar berikut dengan *check list* (V):

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Umur :
4. Bidang :
5. Pendidikan Terakhir : SMA S1 S3
 D3 S2
6. Latar Belakang Pendidikan : Akuntansi Perbankan
 Ilmu Pemerintahan
 Manajemen Lainnya.....
7. Lama Bekerja : < 5 tahun
 5-10 tahun
 11-15 tahun
 16-20 tahun
 > 20 tahun

Sumber Daya Manusia					
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Sebagian besar pegawai yang bekerja di BPKAD berlatar belakang pendidikan keuangan.				
2.	Sebagian besar pegawai memiliki tingkat Pendidikan setara Sarjana.				
3.	Sebagian besar pegawai berlatar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan tugas dan bidangnya.				

4.	Sebagian besar pegawai BPKAD memiliki masa kerja yang cukup.				
----	--	--	--	--	--

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		SS	S	TS	STS
5.	BPKAD sering mengadakan program pelatihan dan pendidikan bagi pegawai untuk pengembangan <i>soft skill</i> pegawai.				
6.	Sebanyak 75% dari pegawai BPKAD mengikuti program pelatihan dan pendidikan keuangan yang diadakan oleh BPKAD.				
7.	Setelah mengikuti pelatihan dan pendidikan keuangan, kinerja pegawai BPKAD meningkat.				
8.	Setelah mengikuti pelatihan dan pendidikan keuangan, kecakapan manajerial pegawai BPKAD meningkat.				
9.	Setelah mengikuti pelatihan dan pendidikan keuangan, tingkat efisiensi waktu dan tenaga pegawai BPKAD semakin meningkat.				
10.	Setelah mengikuti pelatihan dan pendidikan keuangan, tingkat kesalahan pegawai BPKAD menurun.				
11.	Setelah mengikuti pelatihan dan pendidikan keuangan, pelayanan dari pegawai BPKAD semakin meningkat untuk instansi BPKAD				
12.	Setelah mengikuti pelatihan dan pendidikan keuangan, pegawai BPKAD dapat menjaga moral dengan baik.				
13.	Pegawai yang bekerja di BPKAD khususnya di bidang akuntansi telah memahami teori-teori yang berkaitan dengan keuangan.				
14.	Pegawai BPKAD telah memahami aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku (PP 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah)				

Sistem Pengendalian Internal					
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Pimpinan BPKAD selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus-menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern.				
2.	BPKAD telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi.				
3.	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.				
4.	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.				
5.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.				
6.	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.				
7.	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi				
8.	Pimpinan mereview atas kinerja BPKAD.				
9.	Melakukan pengendalian fisik atas aset daerah.				
10.	Melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi yang terjadi				
11.	Bertanggung jawab terhadap sumber daya dan pencatatannya				
12.	Pemisahan fungsi				

13.	Melakukan dokumentasi atas sistem pengendalian inter serta transaksi dan kejadian penting.				
14.	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif				
15.	Telah menggunakan sistem akuntansi yang memudahkan untuk melakukan audit.				
Pengawasan Keuangan Daerah					
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Ada pengawasan secara teratur oleh badan pengawasan daerah atau inspektorat daerah.				
2.	Ada pengawasan preventif yang dilakukan sebelum rencana pelaksanaan dilakukan.				
3.	Ada pengawasan represif yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan rencana yang dilaksanakan.				
4.	Ada pembinaan pengelolaan keuangan daerah.				
5.	Ada evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.				
6.	Laporan keuangan daerah telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
Kualitas Laporan Keuangan Daerah					
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.				
2.	Laporan keuangan yang disusun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan				

	keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu (<i>feedback value</i>).				
3.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.				
4.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.				
5.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang disusun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya				
6.	Dalam penyusunan laporan keuangan, telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.				
7.	Laporan yang disusun, dibuat secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.				
8.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.				



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Jember
di -

JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/894/415/2020

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta tanggal 09 Juli 2020 Nomor : 3282/R/I perihal Permohonan Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NM. : Veronica Geta Tis Prakasita / 22462
- Instansi : Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Alamat : Jl. Kledokan II CT XDX C47 RT 05 RW 02 Caburtunggal, Depok, Sleman
- Keperluan : Mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul :
"Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah"
- Lokasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
- Waktu Kegiatan : Juli 2020 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperkunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 16-07-2020

An. KEPALA BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kab. Kajian Statistik dan Politik



- Tembusan :
- Yth. Sdr. : 1. Dekan Fak. Bisnis dan Ekonomika
Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Yang bersangkutan.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK

Nomor : /PI-PD/PIK.SBY/ 07 / 2020

- I. Jenis Data / Informasi : LHP LKPD Kab. Jember TA 2018 (Buku I)
- II. Tujuan Penggunaan Informasi : Untuk penelitian skripsi
- III. Bentuk Data / Informasi : *Softcopy*
 Hardcopy
- IV. Peminta Data :
- a. Nama : Veronica Geta Tis Prakasita
- b. Jabatan : Mahasiswi
- c. Lembaga : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Alamat : Perum Gedung Agung A-1 RT. 21/RW.06 Kel. Bener Kec. Tegal
Rejo Kota Yogyakarta
- e. No. Telepon/*Handphone* : 0895392717474

Telah menerima dan menyatakan bahwa informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dan perlakuan informasi ini setelah keluar dari kantor BPK menjadi tanggung jawab peminta informasi.

Sidoarjo, 23 Juli 2020

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

Nur Afiatur Rodliyah

Veronica Geta Tis Prakasita

Catatan:

1. Tanda terima yang telah ditandatangani harap dikirimkan melalui faksimile ke 031-8661852 atau melalui email ke humas.jatim@bpk.go.id;
2. Apabila membutuhkan konfirmasi, silakan menghubungi kami di nomor 031-8669244 ext 103, 106 atau 0318661852.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 10 Juli 2020

Nomor : 070 / 6684 / 209.4 / 2020
Sifat : Biasa
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Bupati Jember
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
JEMBER

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 3282/R/1
Tanggal : 9 Juli 2020

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : VERONICA GETA TIS PRAKASITA
Alamat : Perum Gedung Agung A1 RT.021/ RW.006 Yogyakarta Tlp. 0895 3927 17474
Pekerjaan : Mahasiswa/ ATMAJAYA Yogyakarta
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah"
Tujuan/bidang : Mencari data, Wawancara Skripsi (Akuntansi)
Penanggung Jawab : HERIBERTUS ANDRE PURWANUGRAHA, SE., MBA.
Anggota : -
Waktu : 3 Bulan
Lokasi : Kabupaten Jember

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Bidang Politik


JOHAN FITRIADI, S.STP., M.Si

Peneliti (TV/ta)
NIP. 19781120 199802 1 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta ;
2. Yang bersangkutan.